



**PIDATO
PENJABAT GUBERNUR DKI JAKARTA
PADA
RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

Oleh :

**Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd.
Pj. Gubernur DKI Jakarta**

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Kamis, 7 November 2024

Jml: 12 Hlm
Sumber: BPKD

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan.

- Yth. - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, atau yang mewakili;
 - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - Hadirin yang saya hormati.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, ridho dan hidayah-Nya, hari ini kita dapat hadir bersama pada ***Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta***, dalam rangka ***Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025***.

Mengawali pidato ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Dewan, khususnya kepada Pimpinan dan Anggota Banggar yang telah membahas dan mencapai kesepakatan penandatanganan MoU Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, saya akan menyampaikan ***Kebijakan Umum dalam Rancangan APBD yang meliputi kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah***.

Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah, dari sektor: **Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Pendapatan Transfer, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.**

Kebijakan Pajak Daerah dilakukan dengan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Selain itu, kebijakan pajak daerah juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital, harmonisasi kebijakan perpajakan antara pemerintah pusat dan daerah, pemberian insentif fiskal daerah, serta penguatan organisasi dan Sumber Daya Manusia.

Upaya optimalisasi penerimaan **Retribusi Daerah** dilakukan dengan pendataan objek retribusi baru, integrasi sistem untuk Retribusi BLUD, pembuatan regulasi untuk para SKPD Pemungut dan pengembangan Retribusi Online System.

Terkait **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**, kebijakan yang dilakukan meliputi penguatan kinerja keuangan, peningkatan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*), pengembangan SDM, efisiensi operasional, serta investasi dan pengelolaan aset.

Kebijakan peningkatan kinerja sektor **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD) yang Sah** melalui upaya digitalisasi monitoring, evaluasi penerimaan dan rekonsiliasi penerimaan LLPAD.

Kebijakan umum pada **Pendapatan Transfer** difokuskan pada **optimalisasi pengelolaan Pendapatan Transfer**, dengan mengusahakan peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai ketentuan.

Kebijakan umum untuk sektor **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah** difokuskan pada koordinasi pencairan hibah yang dilakukan dengan pihak terkait mengenai MoU penarikan/pencairan, penggunaan dan pelaporan.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya, saya akan menyampaikan terkait kebijakan **Belanja Daerah**. Sesuai Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025, **APBD TA 2025 ditujukan untuk:**

1. Mendorong peran Jakarta sebagai Kota Bisnis berskala Global dengan melakukan perbaikan terhadap permasalahan fundamental melalui prioritas perbaikan pada isu Ketahanan Bencana, Perumahan, Mobilitas, Emisi dan Polusi, Penanganan Sampah, serta Akses Air Bersih dan Air Limbah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, peluang karir dan pekerjaan, peluang bisnis, serta penyediaan ruang publik sesuai perundang-undangan;

3. Menciptakan ekosistem inklusif dan berkembang dalam rangka meningkatkan daya saing industri, inovasi, inklusifitas dan kesetaraan, identitas budaya dan sejarah, transparansi dan akuntabilitas, serta tata kelola yang cerdas;
4. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - a. Subsidi pelayanan publik;
 - b. Hibah sesuai peraturan berlaku;
 - c. Bantuan Sosial bagi komunitas sosial tertentu;
 - d. Bantuan Keuangan bagi Pemerintah Daerah lainnya.
5. Pengalokasian belanja untuk memenuhi urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM);
6. Pemenuhan Belanja Pegawai;
7. Memenuhi Kegiatan Tahun Jamak dengan berpedoman pada Nota Kesepakatan Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Tahun Anggaran 2025-2027.

Kebijakan belanja pada APBD TA 2025 diarahkan pada **pemenuhan Belanja Prioritas** dalam kerangka kesinambungan implementasi *money follow priority program*.

Pada **Pembiayaan Daerah**, Sumber Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2025 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Pengeluaran Pembiayaan akan dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah (PMD) dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya, saya akan menjelaskan rincian **Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025**.

Sebagaimana Anggota Dewan yang terhormat ketahui bersama, kita telah menyepakati Perubahan APBD TA 2024 dengan total nilai sebesar **Rp85,20 triliun**.

Adapun **Total Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025** yang Eksekutif ajukan sebesar **Rp91,14 triliun** atau **naik** sebesar 6,97 persen.

Pendapatan Daerah pada **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025** direncanakan sebesar **Rp81,68 triliun** atau mengalami kenaikan sebesar 8,99 persen dibandingkan dengan **Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024** sebesar **Rp74,94 triliun**.

Pendapatan Daerah diharapkan berasal dari **Pendapatan Asli Daerah** sebesar **Rp54,08 triliun**; **Pendapatan Transfer** sebesar **Rp26,13 triliun**, serta **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** sebesar **Rp1,46 triliun**.

Rencana **Pendapatan Asli Daerah** diharapkan dari **Pajak Daerah** sebesar **Rp47,9 triliun**; **Retribusi Daerah** sebesar **Rp972,58 miliar**; **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** sebesar **Rp774 miliar**, serta **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah** sebesar **Rp4,43 triliun**.

Sedangkan **Pendapatan Transfer** diharapkan sebesar **Rp26,13 triliun** yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat. Selanjutnya, untuk **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah** diharapkan sebesar **Rp1,46 triliun**, berasal dari Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat.

Belanja Daerah pada **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025** direncanakan sebesar **Rp82,32 triliun**. Rencana Belanja Daerah tersebut terdiri dari **Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer**.

Belanja Daerah yang digunakan untuk pemenuhan urusan wajib antara lain untuk urusan pendidikan sebesar Rp20,55 triliun atau 24,96 persen dan untuk belanja infrastruktur sebesar Rp36,30 triliun atau 44,30 persen.

Adapun alokasi belanja untuk prioritas bidang pendidikan dan belanja infrastruktur sebagai *mandatory spending* telah melampaui batas minimal 20 persen untuk pendidikan dan 40 persen untuk infrastruktur dari Total Belanja Daerah pada RAPBD 2025.

Belanja Daerah yang digunakan untuk anggaran prioritas pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota sebesar Rp20 triliun atau 24,30 persen dari total Belanja Daerah;
2. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Rp949,21 miliar atau 1,15 persen dari total Belanja Daerah;
3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Rp15,48 triliun atau 18,80 persen dari total Belanja Daerah;
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Rp2,49 triliun atau 3,04 persen dari total Belanja Daerah.

Rapat Dewan yang terhormat,

Pada bagian akhir dari pidato penyampaian ini, Eksekutif akan menyampaikan penjelasan terkait Pembiayaan Daerah.

Penerimaan Pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp9,45 triliun** yang berasal dari **SiLPA Tahun Sebelumnya** dengan proyeksi sebesar **Rp4,96 triliun** dan **Penerimaan Pinjaman**

Daerah sebesar **Rp4,49 triliun** berupa Penerusan Pinjaman dalam rangka Pembangunan MRT Jakarta sebesar **Rp4,49 triliun**.

Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar **Rp8,81 triliun** yang dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah berupa Penyertaan Modal Daerah sebesar **Rp6,71 triliun** yang diantaranya digunakan untuk pembangunan infrastruktur MRT Fase II sebesar **Rp5,94 triliun** dan LRT Koridor I/b sebesar **Rp767 miliar**. Pengeluaran Pembiayaan lainnya berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar **Rp2,10 triliun** untuk pembayaran utang pokok JEDI dan Utang Pokok PEN, serta pembayaran pokok MRT.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Demikian penyampaian garis besar ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025***).

Eksekutif berharap, penjelasan ini dapat membantu pembahasan pada rapat Komisi sehingga Dewan dan Eksekutif dapat bersinergi menyelesaikan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai jadwal yang telah disepakati bersama.

Saya menyampaikan apresiasi kepada Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang terhormat atas sinergi yang telah berjalan dengan baik selama ini.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita untuk bersinergi membangun **Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global**.

Terima kasih,

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om, Namu Buddhaya.*

Jakarta, 7 November 2024

Pj. Gubernur Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,



Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd.